

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, AKUNTABILITAS, DAN BBNK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN

Floriana Selunu Mojo
florianaselunumoj@gmail.com

Mia Ika Rahmawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This study aims to see the effect of taxpayer awareness, public service accountability, and name transfer of motor vehicle taxpayers at the East Surabaya Samsat Joint Office. This type of research method uses quantitative research. The data used are primary data and secondary data. The population in this study were all motor vehicle taxpayers registered at the East Surabaya Samsat Joint Office. The sampling technique used accidental sampling, with a sample size of 100 respondents. Using a multiple linear regression model with the SPSS 23 program. So the results of this study indicate that taxpayer awareness and vehicle name duties have a positive effect, while government accountability has a negative effect on motor vehicle taxpayers. These results indicate that the taxpayer does not pay the duty tax that must be carried out by motorized vehicles, the service accountability is less comfortable and the taxpayer is satisfied, the transfer fee is higher so that the taxpayer increases.

Keywords: taxpayer awareness, public service accountability, transfer fee for vehicle names, motor vehicle taxpayer compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan bea balik nama kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Timur. Jenis metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Surabaya Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*, dengan jumlah pengambilan sampel sebanyak 100 responden. Menggunakan model regresi linear berganda dengan program spss 23. Sehingga dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, dan bea balik nama kendaraan berpengaruh positif sedangkan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak semakin menyadari membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor, akuntabilitas pelayanan kurang nyaman dan puas terhadap wajib pajak, bea balik nama semakin tinggi sehingga kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, bea balik nama kendaraan, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang akan terus meningkatkan kualitas pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sumber penerimaan negara Indonesia adalah pajak. Maka, pemerintah akan menggali sumber dana berupa pajak, karena pajak yang diperoleh dapat mengatasi masalah yang ada, seperti masalah sosial, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah kebawah sampai menengah keatas semakin terpacu untuk bisa memenuhi segala

kebutuhan yang di butuhkan. Salah satu kebutuhan masyarakat yang harus dimiliki saat ini adalah alat transportasi.

Alat transportasi memang sangat penting dimiliki oleh masyarakat karena mampu menunjang kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, salah satu alat transportasi ini adalah kendaraan bermotor. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor ini tidaklah menjadi barang yang mewah lagi bagi masyarakat, tetapi dapat menjadi salah satu kebutuhan pokok sehari-hari mereka dalam melakukan sesuatu kegiatan. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin meningkat. Meningkatnya daya beli kendaraan bermotor ini menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat tiap tahunnya. Dengan meningkatnya suatu daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor akan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah, karena dapat meningkatkan jumlah pajak yang telah diterima oleh pemerintah daerah.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Surabaya Timur masih dikatakan sangat rendah, hal itu disebabkan dari tunggakan yang sangat banyak. Dapat dilihat dari Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Wajib Pajak Periode Desember 2020

Jenis Wajib Pajak	Pribadi	Umum	PMT/TNI/POLRI
Sedan, Jeep, Station Wagon	2.159.797.500	4.493.000	5.141.200
Bus, Micro Bus	9.163.800	4.826.600	188.100
Truck, Pick Up	650.635.900	355.636.000	694.200
Sepeda Motor	2.966.039.700	-	1.197.250
Alat Berat	480.600	-	-
TOTAL	5.786.117.500	364.955.600	7.220.750

Sumber: Data sekunder dari Kantor Samsat Surabaya Timur, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1 diatas dijelaskan bahwa selama periode 2020 banyak kendaraan bermotor yang mempunyai tunggakan pajak berdasarkan jenis wajib pajak. Tunggakan pajak yang sangat banyak untuk pribadi adalah sepeda motor sebesar 2.966.700, untuk umum tunggakan yang paling besar adalah *truck* dan *pick up* sebesar 355.636, untuk PMT/TNI/POLRI tunggakan yang paling besar adalah sedan, jepp, station wagon sebesar 5.141.200. Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah menyebabkan terjadi besarnya tunggakan pajak kendaraan bermotor. Maka, pemerintah diharapkan agar terus berupaya mengsosialisasikan betapa penting membayar pajak supaya tunggakan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan.

Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pegawai Kantor Samsat Surabaya Timur. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang membayar pajak. Menurut Tanilasari dan Gunarso (2017) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana seorang wajib pajak mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku dan memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk memenuhi segala kewajiban perpajakan.

Menurut Mahaputri dan Noviar (2016) Akuntabilitas pelayanan publik adalah paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia layanan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak juga tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada wajib

pajak yang sedang memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan adanya pelayanan publik yang transparan dan terbuka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah salah satu objek pajak yang diserahkan pengaturan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Dengan diserahkannya kewenangan pengaturan dan pengelolaan PKB dan BBNKB kepada Pemerintah Daerah Provinsi, maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di berbagai daerah provinsi dalam NKRI. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Bea Balik Nama kendaraan bermotor (BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau barang yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor sedangkan Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu menurut Masur (2020) melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib kendaraan bermotor. Penelitiannya dapat memberikan kesimpulan berupa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Nurdian (2019) meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berbeda dengan Yunita dan Diatmika (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, bea balik nama, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, bea balik nama, sanksi perpajakan dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti membahas permasalahan tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas, dan Bea Balik Nama Kendaraan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya Timur. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?, (2) Apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?, (3) Apakah bea balik nama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (2) Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (3) Untuk menguji pengaruh bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Menurut Heider (1958) sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori atribusi ini dapat menjelaskan bagaimana sikap wajib tersebut. Teori atribusi merupakan teori kepatuhan wajib pajak yang terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Dalam teori atribusi dapat dijelaskan bahwa individu atau

perseorangan memiliki kecenderungan untuk mengamati perilaku diri ataupun individu lain dan menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang disebabkan oleh faktor bawah kendali pribadi individu, sedangkan perilaku yang disebabkan faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan (Robbins dan Judge, 2008).

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan (Lindawati dan Hamta, 2016). Definisi pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pungutan atas kendaraan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh orang.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rumiyatun (2017) Kepatuhan wajib pajak yaitu memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajak tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya, dan wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran. Sedangkan menurut Gibson, 1991 (dalam Budiatmanto, 1999), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Jatmiko (2006) kepatuhan wajib pajak bergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada wajib pajak yang sedang dan ingin memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Menurut Rumiyatun (2017), indikator-indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini antara lain: (1) Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (2) Membayar pajaknya tepat pada waktunya, (3) Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya, (4) Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran pajak diharapkan agar wajib pajak dapat memahami dan menyadari tentang pentingnya peran perpajakan, tetapi hal tersebut belum meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena pada dasarnya kesadaran pajak merupakan iktikad baik seseorang untuk membayar pajak dengan tulus dan ikhlas (Indrawan, 2014).

Akuntabilitas Pelayanan Publik

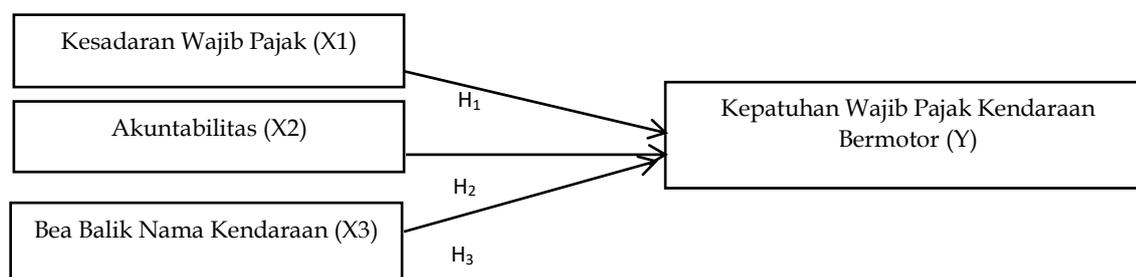
Akuntabilitas pelayanan publik adalah kemampuan SAMSAT dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhan secara transparan dan terbuka. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada publik maupun kepada pimpinan unit pelayanan

instansi pemerintah. Menurut Sasongko (2008) Akuntabilitas Pelayanan Publik adalah suatu paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya yaitu sebagai berikut: (1) *Public service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), (2) *Development Function* (fungsi pembangunan), dan (3) *Protection Function* (fungsi perlindungan).

Bea Balik Nama

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Wajib pajak BBN-KB wajib mendaftarkan penyerahan KB dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan. Penguasaan kendaraan melebihi 12 (dua belas) bulan di luar perjanjian sewa beli dapat dianggap sebagai penyerahan. Pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak mempunyai dua bentuk yaitu yang pertama, kesadaran bahwa pajak adalah suatu bentuk kontribusi warga negara dalam menunjang dan meningkatkan pembagunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran pajak akan sangat merugikan negara, karena pajak adalah sumber pendapatan dan pembangunan terbesar negara (Irianto, 2005). Penelitian Kowel *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin wajib pajak sadar akan kewajiban membayar pajak, maka wajib pajak akan secara sukarela membayar pajaknya dan selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Akuntabilitas pelayanan publik adalah kemampuan SAMSAT dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhan secara transparan dan terbuka. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada publik maupun kepada pimpinan unit pelayanan

instansi pemerintah. Dalam penelitian Susilawati dan Budiarta (2013) mengatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT. Sesuai dengan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan indikator penentu yang mempengaruhi penerimaan negara, oleh karena itu setiap kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya dilakukan dengan menambah jumlah wajib pajak, tetapi juga disertai dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Sari, 2012). Sesuai dengan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Bea Balik Nama berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan penelitian kausal komparatif (*casual comparative*). Dimana penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang berfokus pada pada keluasaan dan objektivitas, sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi diberbagai tempat. Sedangkan penelitian kausal komparatif yaitu penelitian yang menunjukkan arah pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat serta dapat mengetahui sebab akibat antara dua variabel.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2014) pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *accidental sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel karena kebetulan. Responden yang menjadi kriteria dalam penelitian ini ialah semua wajib pajak kendaraan bermotor aktif yang masih terdaftar di kantor SAMSAT Surabaya Timur yang merupakan wajib pajak langsung bukan seorang calo.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis menggunakan primer dan data sekunder. Dimana data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari sumbernya dan tanpa menggunakan perantara. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuisisioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Surabaya Timur. Data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh tidak secara langsung atau bisa dikatakan melalui sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah data tunggakan pajak kendaraan bermotor, dan wajib pajak kendaraan yang terdaftar di kantor Samsat Surabaya Timur.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Menurut Darmawan (2013) variabel penelitian pada dasarnya merupakan suatu hal yang dapat berbentuk apa saja yang dapat ditetapkan oleh peneliti yang bertujuan untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Variabel Independen

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya untuk membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan (Mutiara, 2014). Dengan kesadaran pajak yang tinggi maka kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya meningkat.

Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas pelayanan publik adalah kemampuan SAMSAT dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhan secara transparan dan terbuka. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada publik maupun kepada pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah.

Bea Balik Nama

Menurut Perda Provinsi Sumsel No.3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menjelaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat dengan BBN-KB adalah pajak yang dikenakan sebagai akibat yang terjadi dari perjanjian dua pihak atau sepihak atau keadaan yang terjadi karena transaksi jual beli, warisan, tukar menukar, hibah, atau pemasukan ke dalam badan usaha atas penyerahan atau penggantian hak milik kendaraan bermotor.

Variabel Dependen

Variable dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak berlaku (Wardani, 2017).

Teknis Analisis Data

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner tersebut. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika suatu pernyataan yang terdapat pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur oleh kuesioner tersebut. Agar dapat mengetahui validitas suatu kuesioner yang dibuat peneliti adalah dengan menggunakan cara melakukan korelasi antar skor suatu butir pertanyaan dengan total variable jika r hitung lebih besar dari r table dan bernilai positif maka indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2016). Tetapi bila suatu harga korelasi dibawah 0,30 maka dikatakan pertanyaan dalam kuesioner tersebut tidak valid sehingga dapat dikatakan harus diperbaiki atau dibuang.

Uji Reliabilitas

Merupakan sebuah teknik analisis data untuk mengetahui sejauh mana hasil yang diberikan responden dapat dipercaya. Uji reliabilitas ini dapat digunakan untuk membantu mencari informasi mengenai konsistensi atau kestabilan jawaban yang diberikan oleh responden atas pernyataan yang sudah diberikan oleh peneliti. Jika jawaban yang diberikan oleh konsisten stabil dari waktu ke waktu maka jawaban responden tersebut dapat dikatakan reliabel. Menurut Ghozali (2016) teknik uji reliabilitas ini menggunakan teknik *Alpha Cronbach* (α) > 0,60 maka variable dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas ini mempunyai tujuan untuk menguji ada tidaknya variable pengganggu yang mempunyai distribusi normal dalam model regresi (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik merupakan yang berdistribusi normal bisa juga mendekati normal. Seperti yang telah diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Alat uji yang dapat digunakan adalah alat uji normalitas yang digunakan untuk menguji data yang berdistribusi normal adalah *One Sample Kolmogorov-Smirnov* (KS). Pada pengujian ini dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (KS). Pada pengujian normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, jika *probability value* > 0,05 maka H_0 diterima sedangkan jika *probability value* < 0,05 maka H_0 ditolak.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji atau tidaknya suatu kolerasi antarvariabel independen dalam model regresi. Untuk dapat mengetahui apakah model regresi tersebut terjadi atau tidak maka dapat dideteksi menggunakan cara nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Menurut Ghozali (2016) model regresi dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika suatu nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 ($\geq 0,10$) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 (≤ 10).

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadi atau tidaknya ketidaksamaan varians dari variabel independen untuk keseluruhan pengamatan dalam model regresi. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Nilai signifikansi yang digunakan adalah 5% (Ghozali, 2016).

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan ekstensi dari metode regresi dalam analisis bivariate yang umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variable independen dari pada variable dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linear (Indriantoro dan Supomo, 2011). Tujuan analisis dari regresi linear berganda untuk mengetahui apakah variable independen berhubungan positif atau negative terhadap variable dependen. Maka, model persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 KW + \beta_2 APP + \beta_3 BBN + e$$

Keterangan :

α : Konstanta

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi

KW : Kesadaran Wajib Pajak

APP : Akuntabilitas Pelayanan Publik

BBN : Bea Balik Nama

e : Standar Error

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R^2), Jika nilai R^2 semakin mendekati satu maka yang terjadi konstribusi variable independen terhadap variable dependen sangat baik atau juga bisa

dikatakan layak. Maka sebaiknya jika nilai R^2 mendekati nol maka kontribusi variable independen terhadap variable dependen kurang baik atau bisa dikatakan tidak layak.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Kriteria yang digunakan sama dengan uji t maka saat nilai signifikansi lebih kecil dari 5% maka seluruh variabel independen berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap variabel dependen sehingga dapat dikatakan layak digunakan untuk prediksi lebih mendalam.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing sumbangan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, menggunakan uji masing-masing koefisien regresi variabel bebas apakah memiliki pengaruh yang bermakna atau tidak terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2011). Kriteria pengujian uji t dalam penelitian ini yaitu jika nilai signifikansi lebih kecil dari 5% sesuai dengan alpha yang telah ditentukan sebelumnya maka dapat dikatakan berpengaruh pada signifikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji kualitas data dapat digunakan untuk mengukur data yang diperoleh oleh peneliti dari kuesioner yang telah disebarakan kepada responden sebelumnya.

Uji Validitas

Menurut Ghozali, (2016) uji validitas ini digunakan agar dapat mengetahui tingkat kevalidan sebuah kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data yang dapat diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor variabel jawaban dengan total skor masing-masing variabel. Masing-masing pernyataan dari setiap variabel dikatakan valid jika *Pearson Correlation* $< 0,05$. seluruh item pernyataan kesadaran wajib pajak dapat dikatakan sebagai data yang valid karena persen kolerasi $> 0,3$ jika dibawah $0,3$ maka data dikatakan tidak valid. Data juga dapat dikatakan valid karena nilai signifikan $< 0,05$. pernyataan akuntabilitas pelayanan publik dapat dikatakan sebagai data yang valid karena persen kolerasi $> 0,3$ jika dibawah $0,3$ maka data dikatakan tidak valid. Data juga dapat dikatakan valid karena nilai signifikan $< 0,05$.

Uji validitas bea balik nama kendaraan maka dapat diketahui bahwa keseluruhan pernyataan tersebut adalah data yang valid. Dikatakan data yang valid karena nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$ ($0,000 < 0,05$). Dapat diketahui bahwa setiap item pernyataan memberikan nilai signifikansi $0,000$ sehingga dapat dikatakan valid karena *output* yang dihasilkan $0,000 < 0,05$. Hasil valid tersebut dapat diinterpretasikan jika pernyataan yang telah dibuat sebelumnya sesuai dengan tujuan yang ingin diteliti oleh peneliti.

Uji Reliabilitas

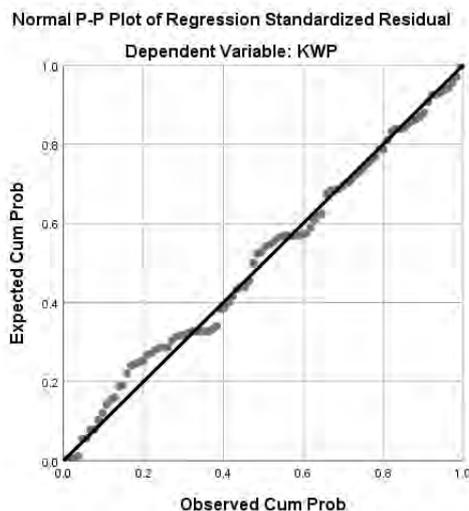
Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dalam mengukur objek yang sama (Ghozali, 2016). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dengan kriteria *cronbach's alpha* $> 0,60$ maka jawaban yang diberikan oleh responden dikatakan reliabel. Variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti. Keseluruhan variabel tersebut adalah kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, bea balik nama dan

kepatuhan wajib pajak memberikan nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dinyatakan sebagai data yang reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam uji normalitas ini peneliti menggunakan bantuan *Normal Probability Plot* (Normal P-Plot). Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan oleh peneliti telah terdistribusi dengan normal atau tidak terdistribusi secara normal. Oleh sebab itu *Normal Probability Plot* (Normal P-Plot) dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Gambar 2

Grafik Uji Normalitas

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Gambar 2 diatas menunjukkan data yang menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas tidak hanya dilihat dari *Normal Probability Plot* (Normal P-Plot) saja namun data tersebut akan diuji lebih lanjut dengan metode *Kolmogorov Smirnov*. Hasil lanjutan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	3,16638095
Most Extreme Differences	Absolute	0,074
	Positive	0,050
	Negative	-0,074
Test Statistic		0,074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa memberikan hasil nilai *asymptotic significant (two tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Karena telah memenuhi kriteria metode *Kolomogrov Smirnov* maka data tersebut dapat dikatakan telah terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah antarvariabel independen tidak berkorelasi atau tidak terjadi multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Uji Multikolinearitas

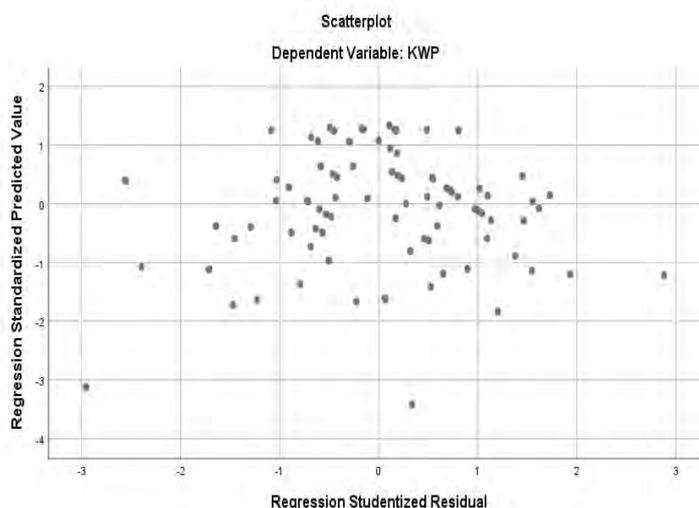
Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
KW		0,583	1,715
	AP	0,484	2,066
	BBN	0,508	1,968

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat diinterpretasikan bahwa nilai tolerance kesadaran wajib pajak sebesar 0,583 dan nilai VIF 1,715. Akuntabilitas pelayanan publik memberikan nilai tolerance 0,484 dan VIF 2,066. Bea balik nama sebesar 0,508 dan VIF 1,968. Maka, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen bebas dari multikolinearitas karena telah memenuhi syarat nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 .

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan yang lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas juga dapat dilakukan dengan grafik *scaterplot* dibawah ini:



Gambar 3
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan Gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi dan telah memenuhi asumsi uji heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi pada penelitian ini menggunakan variabel independen Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Bea Balik Nama Kendaraan sedangkan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hasil perhitungan dari model regresi linear berganda, diperoleh hasil persamaan regresi yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	9,304	2,518		3,695	0,000
KW	0,270	0,114	0,245	2,376	0,020
AP	-0,025	0,064	-0,043	-0,381	0,704
BBN	0,542	0,119	0,503	4,543	0,000

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Dari Tabel 4 diatas dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$KWP = 9,304 + 0,270 KW + (-0,025) AP + 0,542 BBN + e$$

Uji Kelayakan Model

Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut ini dapat dilihat hasil uji koefisien determinasi atas pengaruh kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan bea balik nama kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada perhitungan statistik dibawah ini:

Tabel 5
Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.644 ^a	0,415	0,396

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji koefisien determinasi *R-Square* diperoleh sebesar 0,415 atau 41,5%. Hal tersebut memiliki arti bahwa pengaruh

variabel kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan bea balik nama kendaraan untuk menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak adalah terbatas dikarenakan nilai *R-Square* menjauhi angka 1 atau 100%. Nilai yang dihasilkan *Adjusted R Square* digunakan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan variabel independen (kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan bea balik nama kendaraan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) yaitu sebesar 0,396 atau 39,6% sisanya 60,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan oleh peneliti.

Uji Simultan (Uji F)

Hasil dari uji F ini digunakan untuk mengetahui pengaruh yang disebabkan variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Penentuan apakah model regresi dikatakan layak apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Hasil uji F untuk pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	690,012	3	230,004	22,231	.000 ^b
Residual	972,519	94	10,346		
Total	1662,531	97			

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 6 uji simultan (uji F) diatas dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 22,231 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil (<) 0,05. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan bea balik nama kendaraan berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Uji Parsial (Uji t)

Hasil dari uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam uji ini dilakukan berdasarkan nilai probabilitas, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan berpengaruh signifikan. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 7
Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	9,304	2,518		3,695	0,000
KW	0,270	0,114	0,245	2,376	0,020
AP	-0,025	0,064	-0,043	-0,381	0,704
BBN	0,542	0,119	0,503	4,543	0,000

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada Tabel 7 di atas menunjukkan perumusan hipotesis sebagai berikut: (1) Kesadaran wajib pajak menunjukkan hasil signifikansi 0,020 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_1) dalam penelitian ini diterima dengan demikian kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (2) Akuntabilitas pelayanan publik menunjukkan hasil signifikansi 0,704 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_2) dalam penelitian ini tidak diterima dengan demikian akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (3) Bea Balik Nama Kendaraan menunjukkan hasil signifikansi 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_3) dalam penelitian ini juga diterima dengan demikian bea balik nama kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut di atas bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan oleh data yang menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 2,376 dengan nilai signifikansi sebesar 0,020 dimana lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut responden memberikan jawaban melalui kuesioner dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiya (2017), Pratiwi dan Setiawan (2014) dan Aswati *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak yang dihasilkan.

Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis yang diperoleh sebelumnya menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan oleh besaran t_{hitung} sebesar -0,043 dengan nilai signifikansi sebesar 0,704 dimana lebih besar dari 0,05. Pada penelitian ini, akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan pelayanan yang kurang baik diberikan kepada wajib pajak saat membayar pajak serta transparansi atau keterbukaan laporan kinerja instansi terhadap masyarakat sehingga membuat masyarakat tidak percaya akan kinerja instansi. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan kemampuan samsat dalam melayani keperluan wajib pajak yang memiliki kepentingan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan dan norma-norma perpajakan. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma atau pola baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Susilawati dan Budiarta, 2013).

Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut di atas bahwa bea balik nama kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan oleh data yang menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 4,543 dengan nilai

signifikansi sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut responden memberikan jawaban melalui kuesioner dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi bea balik nama kendaraan bermotor maka akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini tentu mendukung teori-teori dari literatur yang telah dipaparkan sebelumnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan bea balik nama kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan oleh peneliti di bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Timur, (2) Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Timur, (3) Bea balik nama kendaraan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Timur.

Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat dikembangkan penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah: (1) Dalam penelitian ini proses pengambilan data sekunder didapatkan dari Kantor Bersama Samsat Surabaya Timur. Peneliti merasa kesusahaan saat mengambil data dikarenakan virus Covid yang masih aktif, petugas yang memberikan data susah ditemui sehingga menyebabkan penelitian terhambat dan keterbatasan waktu, (2) Saat penyebaran kuesioner, responden mengisi pernyataan kuesioner dengan terburu-buru, sehingga jawaban yang diberikan belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya.

Saran

Penelitian ini mempunyai saran yang dapat dikembangkan penelitian selanjutnya. Saran dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas obyek penelitian dengan menambah variabel bebas lainnya, sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan, lengkap, dan meningkatkan pemahaman, (2) Bagi Kantor Bersama Samsat Surabaya Timur diharapkan agar meningkatkan kualitas pelayanan petugas dalam memberikan pelayanan agar wajib pajak dapat menaati peraturan kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswati., Arifuddin., dan Nurdianti N. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (*Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna*). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan. 3 (1).
- Budiatmanto, Agus. 1999. Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 1983. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Darmawan, D. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23*. Edisi Delapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Heider, Fritz. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. Wiley. New York
- Irianto, E., S 2005. *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta.
- Indrawan, D. 2014. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman, efektifitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak dengan kesadaran

- membayar pajak sebagai variabel intervening (*Studi empiris pada KPP Pratama Bangkinang*). *Jurnal FEKON*. Vol 1(2):173-211.
- Jatmiko, A., N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (*Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*). *Masters thesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Kowel, V., A.A Kalangi, L. dan S.J. Tangkuman. 2019. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA* 7(3):4251-4260.
- Lindawati dan Firdaus Hamta. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Batam). *Jurnal Akuntansi Barelang*. 3(1), 1-18.
- Masur, 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIESIA). Surabaya.
- Mutiara, S., P.T. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Orang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Mahaputri, N., N. T. dan N. Noviyari. 2016. Pengaruh peraturan perpajakan, Kesadaran Pajak dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 17(3):2321-2351.
- Nurdian. 2019. Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Magelang.
- Pratiwi dan Setiawan. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Dinas Pemdapatan Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6 (1): 139-153.
- Rumiyatun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. Universitas Sarjawawiyata Tamansiswa. Yogyakarta.
- Robbins, Stephen P. dan Timothy, A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasional*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sari. 2012. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/26 Wajib Pajak Badan pada Kpp Pratama Denpasar Timur. *Skripsi*. Universitas Udayana. Bali Indonesia.
- Sasongko, H. Ajun. 2008. Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT UPTD Kabupaten Tanggerang Provinsi Banten. *Skripsi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran*. Tangerang Banten.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung
- . 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Susilawati dan Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. Universitas Udayana. Bali Indonesia.

- Tanilasari, Y. dan P. Gunarso. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* 3 (1):1-9.
- Wardani. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak ,Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive THRU terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. Universitas Sarjawawiyata Tamansiswa. Yogyakarta.
- Yunita, Kurniawan, dan Diatmika. 2017 . Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Wilayah Kabupaten Banyuwangi. *Skripsi*. Universitas Pendidikan Ganesha .Singaraja Indonesia.